

B. SARAN

Bilamana timbul permasalahan/problematika dalam penentuan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka diperlukan koordinasi antar pemerintah dalam penentuan kewenangan yang dipermasalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction the Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Silalahi, U. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Peneltian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soeratno, & Arsyad, L. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*.

Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Sumajouw, J., Sompie, B. F., & Timboeleng, J. A. (2013). Analisis Dampak Lalu

Lintas (Andalalin) Kawasan Kampus Universitas Ratulangi. *Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 3 No. 2., Universitas Sam Ratulangi*, 133.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jime/article/view/4273>

Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta:

Sinar Grafika.

Tamin, O. Z. (1999). *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung: ITB.

Tjandra, W. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas

Atma Jaya.

Widodo, A. S. (2007). Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pada Pusat

Perbelanjaan yang Telah Beroperasi Ditinjau Dari Tarikan Perjalanan (Studi Kasus Pada Pacific Mall Tegal). *Tesis, Program Pascasarjana,*

Universitas Diponegoro, Semarang, 7.

http://eprints.undip.ac.id/16517/1/ARIEF_SUBECHI_WIDODO.pdf

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2023 Tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Diakses dari https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pegub_24_th_2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161874/pp-no-30-tahun-2021>

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Penyelenggaraan Perhubungan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161530/perda-prov-jawa-tengah-no-1-tahun-2020>

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/284234/permenhub-no-17-tahun-2021>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses

dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>